

**PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN MELALUI
REHABILITASI SOSIAL PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI
SEHAT DI KECAMATAN MONANO KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

OLEH :
YOHANA DIZCA AYUNANI
NIM. S.21.16.034

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2020

HALAMAN PENGESAHAN

PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN MELALUI
REHABILITASI SOSIAL PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI
SEHAT DI KECAMATAN MONANO KABUPATEN
GORONTALO UTARA

Oleh :

YOHANA DIZCA AYUNANI
NIM. S.21.16.034

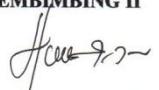
SKRIPSI

Telah Disetujui dan Siap Untuk di Ujian
Gorontalo,2020

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Bala Bakri, SE, S.IP., S.Psi., MM
NIDN. 0002057501


Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si
NIDN. 0930048307

Mengetahui,


Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN.0924076701

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN MELALUI
REHABILITASI SOSIAL PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI
SEHAT DI KECAMATAN MONANO KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

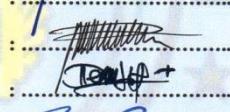
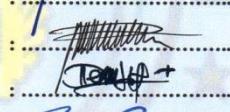
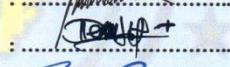
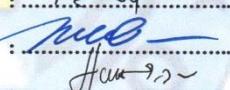
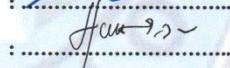
Oleh :

**YOHANA DIZCA AYUNANI
NIM. S.21.16.034**

SKRIPSI

**Telah Dipertahankan Di Depan Penguji
Pada Tanggal.....2020
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat**

Komisi Penguji :

1. Dr. Arman, S.Sos., M.Si : 
2. Novalliansyah Abdussamad, S.IP., MA : 
3. Deliana Vitasari Djakaria, S.IP., M.IP : 
4. Dr. Bala Bakri, SE., S.IP., S.Psi., MM : 
5. Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si : 

Mengetahui



**Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN. 0913078602



**Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan**
Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
NIDN. 0924076701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutuan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, Mei 2020
Yang membuat pernyataan

YOHANA DIZCA AYUNANI

ABSTRAK

YOHANA DIZCA AYUNANI. NIM. S.21.16.034. PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN MELALUI REHABILITASI SOSIAL PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI SEHAT DI KECAMATAN MONANO KABUPATEN GORONTALO UTARA. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penurunan angka kemiskinan melalui rehabilitasi sosial program rumah layak huni sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang bersifat deskritif analisis. Informasi didapatkan melalui wawancara pada aparat kecamatan dan aparat desa. Dokumentasi gambar pembangunan rumah layak sehat diambil pada desa terkait dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan program pembangunan rumah layak huni sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara belum signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan karena program pembangunan rumah layak huni sehat merupakan bantuan dalam peningkatan kesejahteraan sosial yang berupaya membuat hidup lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup lebih baik.

Kata Kunci : Penurunan angka kemiskinan, pembangunan rumah layak huni sehat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah selalu penulis memuji Tuhan Yang Maha Kuat, Maha Perkasa yang telah menciptakan semua yang dilangit dan dibumi maupun dikedalaman lautan baik yang terlihat maupun tidak, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah dilangit dan dibumi kecuali Allah. Dzat Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa yang telah menggantungkan segala kebutuhan manusia untuk roda kehidupan dimuka bumi, dari makanan, minuman dan pakaian. Dengan memuji nama-Nya Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan sesuai target delapan semester dan menyusun skripsi secara tepat waktu dengan judul, **“Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Rehabilitasi Sosial Program Rumah Layak Huni Sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara”**

Salam hormat penulis panjatkan kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya oleh sang pencipta Allah SWT dan juga ditutupnya seluruh risalah Nabi-nabi dan Rosul dengan diutusnya beliau. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman mengejar sebuah nilai ibadah yang telah ditetapkan dengan mengucap sholawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Melalui tulisan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Pembina Yayasan sekaligus Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku ketua Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Arman, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sekaligus menjadi tim penguji
4. Ibu Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
5. Bapak Dr. Bala Bakri, SE., S.IP., S.Psi., MM selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan petunjuk serta bimbingan bagi penulis selama penyusunan skripsi
6. Ibu Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik dan membimbing penulis selama dalam bangku kuliah yang karena ilmu yang telah diajarkan dapat dituangkan dalam penyusunan skripsi
8. Camat Monano, Kepala Desa Monano, Plt. Kepala Desa Monas, Kepala Desa Sogu dan segenap aparat pemerintah desa maupun staf yang telah bersedia membantu penulis memberikan data dan informasi yang karena bantuannya mampu melengkapi kekurangan dari skripsi ini
9. Ucapan khusus dan spesial penulis ucapkan kepada suami tercinta Jamin A. Hasu yang senantiasa dengan sabar menemani selama proses penyusunan skripsi dan pengambilan data maupun informasi
10. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ibu Suki Wahyuliyati dan Bapak Yhuni Negus Eko Pamudji yang tak henti-hentinya memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat dirampungkan
11. Ucapan terimakasih kepada mertua penulis, Ibu Warsi Patila dan Bapak Ardin A. Hasu yang tak henti-hentinya memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat dirampungkan

12. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik angkatan 2016 khususnya kelas non-reguler yang
telah bersama-sama berjuang

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan, baik dalam penyusunan kata, kalimat maupun informasi karena keterbatasan kemampuan teori dan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi lebih lengkap dan bermanfaat bagi khayalak umum.

Gorontalo, Mei 2020
Penulis,

Yohana Dizca Ayunani
S2116034

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1. Latar Belakang Penelitian	12
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	18
1.4. Manfaat Penelitian	18
1.4.1. Manfaat Teoritis	18
1.4.2. Manfaat Praktis.....	19
1.4.3. Manfaat Bagi Peneliti	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
2.1. Kemiskinan	20
2.1.1. Pengertian Kemiskinan.....	20
2.1.2. Ciri-Ciri Kemiskinan	24
2.1.3. Indikator Kemiskinan	24
2.1.4. Sejarah Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia.....	27
2.1.5. Faktor Penyebab Kemiskinan.....	30
2.2. Rehabilitasi Sosial Program Rumah Layak Huni	31
2.2.1. Pengertian Rehabilitasi Sosial Program Rumah Layak Huni Sehat.....	31
2.2.2. Program Pembangunan Rumah Layak Huni Sehat	32
2.2.3. Maksud, Tujuan Dan Lingkup Pembangunan Mahyani Sehat.....	33

2.2.4. Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Layak Huni Sehat.....	36
2.3. Kerangka Berpikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Objek Penelitian.....	41
3.2. Jenis Penelitian.....	41
3.3. Lokasi Penelitian.....	41
3.4. Informan.....	42
3.5. Sumber Data.....	42
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.7. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.2. Struktur Organisasi	49
4.3. Penyajian Dan Analisis Data Hasil Penelitian	50
BAB V PENUTUP	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara yang besar, baik jumlah penduduk yang besar, hutang yang besar dan penduduk miskin yang juga besar. Kemiskinan ini merupakan amanah konstitusi dan menjadi tanggungjawab Negara Indonesia yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.” yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di mana Negara mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan fakir miskin dan keluarganya.

Berbagai program dari pemerintah pusat dan daerah pun bermunculan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program pemerintah yang sudah dijalankan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di sini hanya pada dua masa pemerintahan orde reformasi. Untuk membedakan satu dengan yang lainnya, maka dibagi dua, yaitu program zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan Presiden Jokowi. Namun, untuk melengkapi khazanah program penanggulangan kemiskinan juga terdapat program spesifik yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial

yang telah banyak memberikan manfaat bagi rumah tangga miskin dan PMKS.

Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah telah menetapkan tiga jalur strategi pembangunan, yaitu : (1) Pro-pertumbuhan untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi; (2) Pro-Lapangan Kerja agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja; (3) Pro-Masyarakat Miskin agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat

Program penanggulangan pada era pemerintahan Presiden Jokowi adalah melanjutkan agenda pemerintahan sebelumnya, yaitu dengan program percepatan penanggulangan kemiskinan di mana pada tanggal 3 November 2014 ditandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 166 tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program tersebut terdiri dari 3 program, yaitu program usaha ekonomi kecil dan mikro, program pemberdayaan masyarakat, dan program bantuan sosial. Ditambah dengan program Kartu Sakti Jokowi yang meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2019

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi (Ribu Jiwa)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	1,711	1,690	1,702	1,671	1,629
Sumatera Utara	2,972	2,909	2,780	2,617	2,543
Sumatera Barat	729	748	725	710	691
Riau	1,094	1,017	1,011	995	975
Jambi	612	581	565	563	548
Sumatera Selatan	2,258	2,198	2,174	2,145	2,141
Bengkulu	657	654	620	605	600
Lampung	2,264	2,309	2,215	2,189	2,105
Kep. Bangka Belitung	141	144	150	146	136
Kep. Riau	237	240	254	257	256
DKI Jakarta	768	770	783	745	728
Jawa Barat	8,921	8,392	7,943	7,155	6,775
Jawa Tengah	9,083	9,001	8,648	7,765	7,423
DI Yogyakarta	1,036	984	955	910	889
Jawa Timur	9,565	9,342	9,022	8,625	8,168
Banten	1,393	1,316	1,375	1,330	1,296
Bali	416	353	357	340	321
Nusa Tenggara Barat	1,626	1,591	1,542	1,473	1,442
Nusa Tenggara Timur	2,320	2,300	2,286	2,276	2,276
Kalimantan Barat	789	772	776	757	749
Kalimantan Tengah	296	281	277	273	266
Kalimantan Selatan	388	380	388	384	383
Kalimantan Timur	423	424	439	441	441
Kalimantan Utara	81	88	98	100	97
Sulawesi Utara	426	403	394	382	380
Sulawesi Tengah	828	834	841	834	814

Sulawesi Selatan	1,662	1,604	1,639	1,572	1,527
Sulawesi Tenggara	667	654	645	609	603
Gorontalo	413	407	406	387	371
Sulawesi Barat	314	300	299	305	303
Maluku	656	660	641	638	637
Maluku Utara	153	151	155	163	172
Papua Barat	451	449	441	428	419
Papua	1,757	1,826	1,808	1,833	1,827
Indonesia	57,106	55,770	54,354	51,624	49,931

Sumber : BPS Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak terjadi tahun 2015 dengan total 57,106 ribu jiwa dan terus mengalami penurunan hingga jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 tersisa 49,931 ribu jiwa. Ini berarti program yang dijalankan oleh pemerintah telah berhasil.

Mengacu pada tabel 1.1 jumlah penduduk miskin tahun 2019, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, disusul dengan provinsi Jawa Tengah di posisi kedua dan provinsi Jawa Barat berada di posisi ketiga. Hal ini sangat wajar mengingat kondisi Pulau Jawa yang sangat padat akan penduduk dan langkanya lapangan pekerjaan sehingga menjadikan Pulau Jawa merupakan salah satu pulau dengan penduduk miskin paling banyak di Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah utama di setiap provinsi di Indonesia. Tak terkecuali dengan Provinsi Gorontalo yang menempati posisi ke 27 dari total 34 provinsi. Provinsi Gorontalo tergolong provinsi yang masih muda. Namun jumlah kemiskinan di Provinsi Gorontalo mencapai

371.000 jiwa pada tahun 2019. Meskipun jumlah kemiskinan di Provinsi Gorontalo tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, kenyataannya akan sangat berbeda apabila kita melakukan observasi secara langsung di Provinsi Gorontalo. Jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten se-Provinsi Gorontalo akan disajikan pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018

Wilayah Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo (Ribu Jiwa)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Boalemo	30.5	32.19	32.29	34.35	32.83
Gorontalo	77.66	80.52	78.36	76.93	74.69
Pohuwato	29.85	32.7	31.66	32.56	30.39
Bone Bolango	25.31	28.19	27.8	27.91	27.61
Gorontalo Utara	20.15	21.06	20.65	21.67	21.09
Kota Gorontalo	11.64	12.18	12.43	11.95	11.91

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2020

Melalui tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah kemiskinan di Provinsi Gorontalo paling banyak terdapat pada Kabupaten Gorontalo dengan total masyarakat miskin mencapai 746.900 pada tahun 2018. Disusul oleh Kabupaten Boalemo dengan total masyarakat miskin mencapai 328.300 pada tahun 2018 dan Kabupaten Pohuwato menempati posisi ketiga dengan total masyarakat miskin pada tahun 2018 mencapai 303.900.

Pada posisi keempat ditempati oleh Kabupaten Bone Bolango dengan total masyarakat miskin mencapai 276.00 jiwa. Pada posisi kelima ditempati oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan total masyarakat miskin mencapai

210.900, dan posisi terakhir ditempati oleh Kota Gorontalo dengan total masyarakat miskin hanya mencapai 119.100 jiwa.

Meskipun Kabupaten Gorontalo Utara menempati posisi ke 5 se-Provinsi Gorontalo dengan total masyarakat miskin hanya 210.900 pada tahun 2018, namun apabila dilakukan observasi secara langsung terhadap kondisi perumahan penduduk terutama pada Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut akan sangat tinggi dikarenakan rumah yang dimiliki sebagian besar penduduk merupakan rumah tidak layak huni berukuran kurang dari 4×4 m² yang didirikan dari sisa-sisa pembuangan perusahaan jasa pemotongan kayu log (*sawmill*) dan tidak adanya WC pribadi sehingga terkesan kumuh.

Dari fenomena inilah salah satu upaya pemerintah muncul dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, yakni dengan pembangunan rumah layak huni sehat.

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengetahui pelaksanaan program rumah layak huni (mahyani) sehat dalam rangka penurunan kemiskinan melalui penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Rehabilitasi Sosial Program Rumah Layak Huni Sehat Di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (masyarakat) sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara
2. Bagaimana dampak pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (masyarakat) sehat terhadap penurunan kemiskinan di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (masyarakat) sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (masyarakat) sehat terhadap penurunan kemiskinan di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan mendatang khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan melalui program rehabilitasi rumah layak huni sehat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber data pada Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengetahui dampak pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (mahyani) sehat terhadap penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4.3. Manfaat Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini penulis berharap bisa menjadi salah satu hasil penelitian tentang pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (mahyani) sehat terhadap penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kemiskinan

2.1.1. Pengertian Kemiskinan

Secara harfiah menurut Poerwadarminta (dalam Bambang Rustanto, 2015:1), kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. (BPS dan Depsos dalam Edi Suharto, 2017:133-134)

Narayan (dalam Bambang Rustanto, 2015:2) mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut : “*Poor here means lacking most or all of these*

assets and capabilities, material assets, bodily health, bodily integrity, emotional integrity, respect and dignity, social belonging, cultural identity, imagination, information and education, organizational capacity, political representation and accountability” (Miskin di sini dimaknai dengan ketiadaan aset/kekayaan dan kemampuan, kekayaan harta, kesehatan, integritas, emosi, penghormatan, rasa memiliki sosial, identitas budaya, imajinasi, informasi, dan pendidikan, kemampuan berorganisasi dalam ranah politik dan akuntabilitas.

Menurut Edi Suharto (2017), kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurang pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya.

Kuncoro (dalam Bambang Rusdianto, 2015) kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Adapun Kartasasmita (dalam Bambang Rusdianto, 2015) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan

yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan Friedmann (dalam Bambang Rusdianto, 2015) bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosialnya.

Akan tetapi, Brendley (dalam Bambang Rusdianto, 2015) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuat oleh Salim (dalam Bambang Rusdianto, 2015) yang menyatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok.

Menurut Al-Ghaziy (dalam Bambang Rusdianto, 2015), kemiskinan digolongkan menjadi dua, yaitu orang fakir dan orang miskin. Orang fakir adalah orang yang menganggur dan tidak mempunyai penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang miskin adalah orang yang bekerja, tetapi penghasilannya hanya dapat memenuhi sebagian (sekitar 50%-70%) kebutuhan hidupnya. Sehingga orang fakir adalah orang miskin yang paling rendah, sedangkan orang miskin adalah orang berada dibawah garis rata-rata kehidupan masyarakatnya, bahkan orang miskin memiliki kewajiban membayar zakat kalau pendapatannya sudah mencapai nisabnya (Bambang Rusdianto, 2015:3).

Fakir dan miskin merupakan dua kata yang berbeda makna menurut buku-buku ilmiah dalam bahasa Arab. Al-Sa'dly (dalam Bambang Rusdianto, 2015), mengutip surah At-Taubah menjelaskan bahwa fakir dan miskin merupakan kata yang berdiri sendiri-sendiri, terkadang bisa bermakna fakir dan terkadang bisa bermakna miskin, tetapi apabila disebutkan secara bersamaan, maka fakir dikatakan lebih rendah daripada miskin.

Selanjutnya Al-Jarullah (dalam Bambang Rusdianto, 2015), mengutip pendapat Imam Syafii bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta kebutuhan lainnya bagi dirinya maupun orang yang menjadi tanggung jawabnya. Lebih lanjut mengutip pendapat Abu Hanifah bahwa fakir adalah orang yang memiliki harta kurang dari nisab dan bahkan berhak mendapatkan zakat untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Bambang Rusdianto, 2015:3).

Berdasarkan Undang-Undang No.13 tahun 2011, kedua kata tersebut tidak memiliki makna yang berbeda, tetapi menjadi satu makna yang sama dengan menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

2.1.2. Ciri-Ciri Kemiskinan

Menurut Soeharto (dalam Bambang Rustanto, 2015) Kemiskinan bermakna tidak memiliki harta, tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan fisik.

Ciri – ciri kemiskinan yaitu :

1. Tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
2. Tidak memiliki kemampuan untuk berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental
3. Tidak memiliki kemampuan untuk keberfungsian sosial
4. Sumber Daya Manusia masih rendah
5. Masih sangat rentan terhadap keguncangan baik faktor internal maupun eksternal
6. Tidak adanya lapangan kerja
7. Tidak adanya mata pencaharian yang berkesinambungan
8. Tidak adanya akses terhadap kesehatan
9. Tidak memiliki jaminan masa depan
10. Ketidakberuntungan sosial seperti wanita korban kekerasan rumah tangga, kelompok marginal, anak terlantar dan janda miskin

2.1.3. Indikator Kemiskinan

Kemiskinan agrerat menunjukkan proporsi dan jumlah penduduk miskin yang hidup dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan agrerat

atau yang sering disebut angka kemiskinan makro digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu bangsa. Perhitungan kemiskinan yang digunakan adalah pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan. Dalam implementasinya dihitunglah garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Angka jumlah penduduk miskin seperti yang dijelaskan di atas disebut juga sebagai *Poverty Headcount Index* atau P_0 . Jumlah penduduk yang memiliki tingkat konsumsi di bawah garis kemiskinan ini sering juga disebut sebagai *Poverty Incidence*. Ukuran kemiskinan lain yang sering digunakan adalah *Poverty Gap Index* atau P_1 . Indeks ini menggambarkan selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Indeks ini menggambarkan kedalaman kemiskinan (*the depth of poverty*). Perkembangan angka indeks P_1 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan.

Ukuran kemiskinan lain adalah *Poverty Severity Index* atau P_2 . Indeks Keparahan Kemiskinan ini adalah jumlah dari kuadrat selisih (dalam persen

terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada di atas garis kemiskinan. Dengan melakukan pengkuadratan, indeks ini memberi bobot yang lebih besar bagi penduduk miskin yang memiliki pengeluaran jauh di bawah garis kemiskinan. Serupa dengan P_1 , perkembangan angka indeks P_2 dari waktu ke waktu yang semakin kecil menunjukkan terjadinya perbaikan

Indikator lain oleh BPS adalah kecukupan makanan atau kalori bahwa apabila satu penduduk tidak mampu memenuhi kecukupan konsumsi makanan setara 2.100 kalori per hari ditambah pemenuhan kebutuhan pokok minimum non makanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aneka barang atau jasa.

Indikator kemiskinan lain yang memiliki rasionalisasi yang dipakai oleh lembaga pemerintah adalah indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh BKKBN, yaitu keluarga prasejahtera dan sejahtera.

Indikator keluarga sejahtera :

- 1) Setiap anggota keluarga makan dua kali sehari
- 2) Setiap anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda
- 3) Atap, dinding dan lantai rumah dalam kondisi yang baik
- 4) Berkemampuan membawa anggota keluarga yang sakit ke puskesmas atau rumah sakit

- 5) Berkemampuan KB di sarana pelayanan kontrasepsi
- 6) Anak berumur 7-15 tahun mampu menempuh jenjang pendidikan

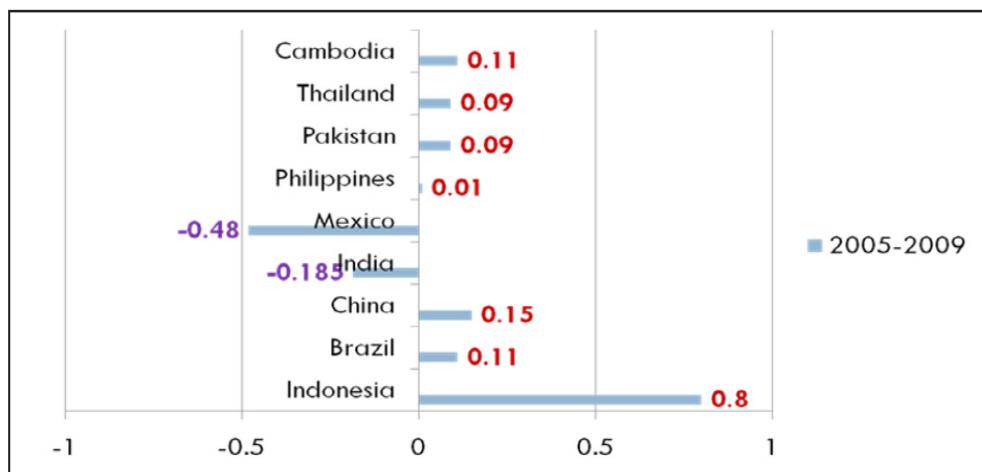
2.1.4. Sejarah Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan buku Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II, angka kemiskinan di Indonesia sejak 1998 – 2011 terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penurunan angka kemiskinan di Indonesia sejak 1998 – 2010 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.1 Penurunan angka kemiskinan di Indonesia sejak 1998 – 2010

Tahun	Jumlah (Ribu)	Persentase (%)
1998	49,50	24,23
1999	47,97	23,43
2000	38,70	19,14
2001	37,90	18,41
2002	38,40	18,2
2003	37,30	17,42
2004	36,15	16,66
2005	35,10	15,97
2006	39,30	17,75
2007	37,17	16,58
2008	34,96	15,42
2009	32,53	14,15
2010	31,02	13,33
2011	30,02	12,49

Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang 2005 – 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata – rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain seperti Kamboja, Thailand, China, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin. Perbandingan tingkat penurunan dan pertambahan penduduk miskin per tahun di berbagai negara berkembang bisa di lihat pada grafik berikut ini :



Kendati Indonesia adalah negara yang paling berhasil menurunkan angka kemiskinan, akan tetapi masih terdapat disparitas antar provinsi. Ada provinsi yang berhasil menurunkan presentase penduduk miskinnya dengan

cepat adapula yang lambat. Berikut merupakan tabel kemiskinan beberapa provinsi di Indonesia pada tahun 2010 :

Tabel 2.2 Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada Tahun 2010

Provinsi	Tingkat Kemiskinan Provinsi (%)
Aceh	19,57
Sumatera Utara	11,33
Sumatera Barat	9,04
Riau	8,47
Jambi	8,65
Sumatera Selatan	14,24
Bengkulu	17,5
Lampung	16,93
Kepulauan Bangka Belitung	5,75
Kepulauan Riau	7,4
DKI Jakarta	3,75
Jawa Barat	10,65
Jawa Tengah	15,76
DI Yogyakarta	16,08
Jawa Timur	14,23
Banten	6,32
Bali	4,2
Nusa Tenggara Barat	19,73
Nusa Tenggara Timur	21,23
Kalimantan Barat	8,6
Kalimantan Tengah	6,56
Kalimantan Selatan	5,29
Kalimantan Timur	6,77
Sulawesi Utara	8,51
Sulawesi Tengah	15,83
Sulawesi Selatan	10,29
Sulawesi Tenggara	14,56
Gorontalo	18,75
Sulawesi Barat	13,89
Maluku	23
Maluku Utara	9,18
Papua Barat	31,92
Papua	31,98

2.1.5. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kartasasmita (dalam Rustanto, 2015) Terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan), seperti (1) kemiskinan natural, (2) kemiskinan kultural, dan (3) kemiskinan kultural

1) Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin, kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (dalam Rustanto, 2015) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti karena cacat, sakit, lanjut usia, atau karena bencana alam.

2) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka hidup tidak berkecukupan dan selalu merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan mengubah tingkat hidupnya.

Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum

3) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Munculnya kemiskinan struktural disebabkan oleh adanya upaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakannya bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilik sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang

2.2. Rehabilitasi Sosial Program Rumah Layak Huni

2.2.1. Pengertian Rehabilitasi Sosial Program Rumah Layak Huni Sehat

Berdasarkan Permensos Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan pengertian rumah tidak layak huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Sedangkan rehabilitasi

sosial program rumah layak huni adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

Rehabilitasi Sosial bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat

2.2.2. Program Pembangunan Rumah Layak Huni Sehat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 24, rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) Sehat Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Kabupaten Gorontalo Utara, mahyani sehat adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok yang

meliputi pembangunan rumah baru beserta lingkungan dan dilengkapi dengan sarana kesehatan berupa MCK.

Sedangkan program pembangunan rumah layak huni sehat atau yang disingkat dengan mahyani sehat adalah fasilitas pemerintah berupa kegiatan penyediaan atau pembangunan mahyani sehat kepada rumah tangga miskin penerima program pembangunan mahyani sehat.

2.2.3. Maksud, Tujuan Dan Lingkup Pembangunan Mahyani Sehat

Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) Sehat Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Kabupaten Gorontalo Utara Bagian Kedua Pasal (2), maksud dari pembangunan mahyani sehat bagi rumah tangga miskin adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan/atau rumah tangga miskin akan rumah yang layak untuk ditempati.

Adapun tujuan pembangunan mahyani sehat bagi rumah tangga miskin adalah untuk peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin serta dalam rangka pengentasan kemiskinan, menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Sedangkan lingkup pembangunan mahyani sehat adalah rumah tangga miskin dengan berbagai kriteria, yakni :

a. Kriteria Penerima Program

- Warga Negara Indonesia
- Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah masyarakat penerima Program Pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) Sehat
- Sudah berkeluarga dan atau pernah berkeluarga
- Memiliki atau menguasai tanah yang tidak dalam sengketa
- Belum memiliki rumah, atau memiliki rumah tidak layak huni
- Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran, kerusuhan sosial atau rumah yang terkena dampak kegiatan pembangunan fasilitas umum
- Berperan secara aktif dan ikut berpartisipasi dan/ atau swadaya untuk pelaksanaan dan penyelesaian pembangunan rumah layak huni sehat

b. Kriteria Objek Program

- Rumah tidak layak huni yang berada diatas tanah dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya, bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi dan tidak dalam status sengketa
- Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang berlantaikan tanah

- Bahan dinding berupa bilik bambu, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan
- Bahan atap berupa daun (rumbia) yang sudah rapuh
- Bangunan dengan lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9 m^2

c. Persyaratan Permohonan

Rumah tangga miskin yang memohon pembangunan mahyani sehat harus memenuhi persyaratan administrasi yang terdiri dari :

- Surat permohonan dari rumah tangga miskin
- Surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan :
 - a. Belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD Provinsi atau Kabupaten
 - b. Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi
 - c. Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah
 - d. Akan menghuni sendiri rumah yang mendapat pembangunan rumah layak huni sehat

- e. Tidak memberikan dana pembangunan rumah layak huni sehat kepada pihak lain dengan dalih apapun
- f. Bersungguh-sungguh mengikuti program pembangunan rumah layak huni sehat dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni sehat
- g. Fotokopi sertifikasi hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa
- h. Fotokopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup dan fotokopi kartu keluarga

2.2.4. Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Layak Huni Sehat

Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) Sehat Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh pelaksana dan penerima program pembangunan mahyani sehat guna terciptanya ketertiban pelaksanaan program pembangunan mahyani sehat, yaitu :

A. Tahap perencanaan

Masing-masing desa menyampaikan usulan pembangunan masyarakat sehat sesuai kriteria yang meliputi :

- a. Memprioritaskan calon penerima sebagai KK Miskin yang belum memiliki rumah. Jika jumlah belum memenuhi kuota, maka calon penerima yang diusulkan adalah KK miskin yang memiliki rumah tapi tidak layak untuk dihuni
- b. Memiliki tanah/lahan sendiri dengan ukuran luas minimal 30 m² dan mempunyai bukti legalitas tanah berupa Sertifikat atas nama calon penerima, SPPHT, atau minimal Surat Keterangan Kepala Desa mengetahui Camat
- c. Penduduk desa setempat dan dapat dibuktikan dengan Kartu Penduduk atau Surat Domisili dari Kepala Desa mengetahui Camat
- d. Usulan calon penerima yang sudah memenuhi persyaratannya dapat diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk selanjutnya dilakukan kembali identifikasi dan verifikasi oleh Camat bersama staff Kecamatan sehingga akan mendapatkan calon penerima yang benar-benar berhak menerima
- e. Hasil identifikasi dan verifikasi tersebut akan disepakati melalui rapat ditingkat Kecamatan bersama-sama Kepala Desa dan seluruh Kelembagaan Desa untuk selanjutnya

ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat sebagai penerima Program Pembangunan Mahyani Sehat dimasing-masing desa

B. Tahap penganggaran

Tahap penganggaran pembangunan program mahyani sehat meliputi :

- a. Nilai untuk program pembangunan mahyani sehat berdasarkan alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD setiap tahun anggaran
- b. Untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan mahyani sehat dapat dialokasikan biaya operasional belanja pegawai dan belanja barang dan jasa

C. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pembangunan program mahyani sehat antaralain :

- a. Pelaksanaan pembangunan mahyani sehat dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat
 - b. Biaya pembangunan mahyani sehat ditransfer langsung ke rekening bendahara tim pelaksana mahyani sehat di lokasi pembangunan mahyani sehat apabila sudah memenuhi ketentuan.
-
- c. Gambar dan Volume/ukuran rumah :
 - Gambar/desain, spesifikasi bangunan mahyani dibuat oleh masing-masing Kecamatan dengan

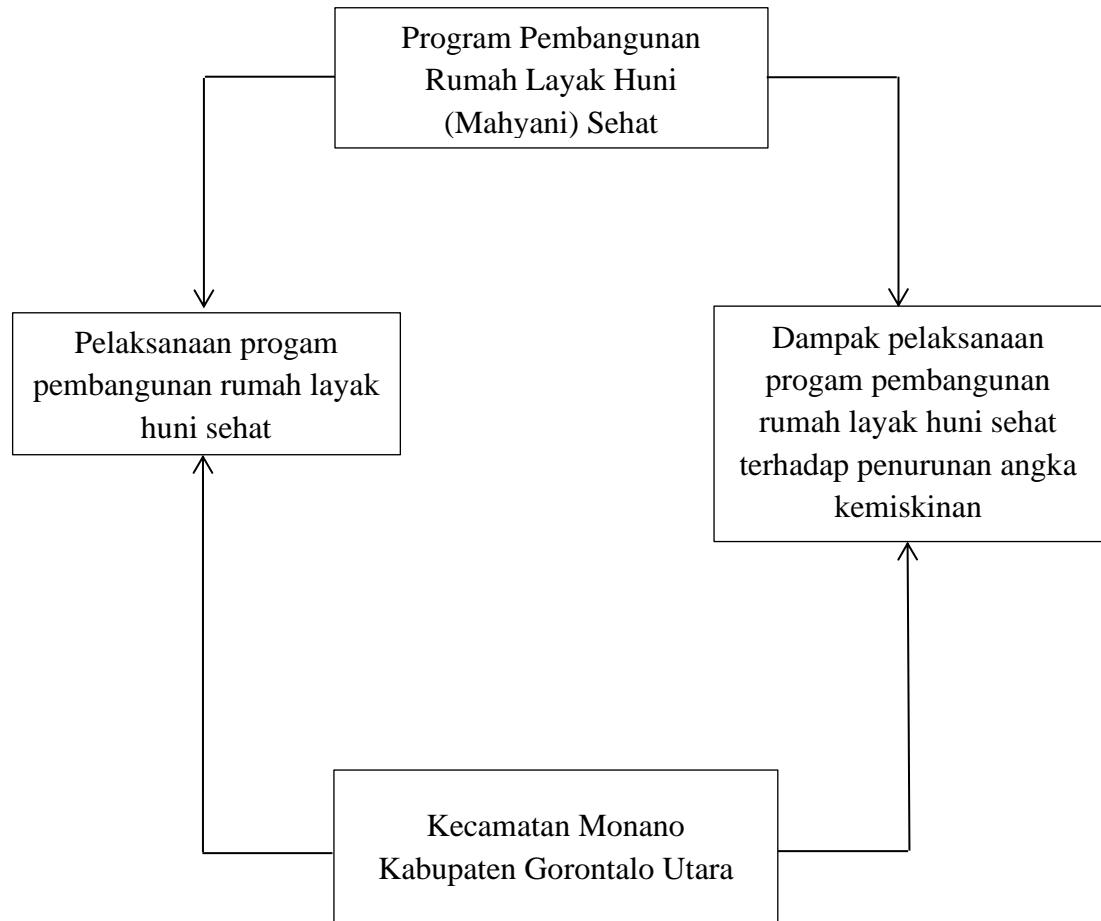
volume/ukuran luas bangunan mengikat yakni 5×6 M atau 30 m^2 ditambah kamar mandi dan WC ukuran 1.5×1.5 yang menjadi satu kesatuan dari Dokumen Kontrak Kerja.

- Penambahan ukuran luas rumah oleh pemilik rumah dapat dilakukan setelah terjadi penandatanganan Berita Acara Penyelesaian antara Camat dan Kepala Desa
- Pembangunan rumah layak huni sehat dinyatakan selesai 100% apabila telah dilakukan plesteran lantai, dinding seluruh sebagian dalam dan dinding luar bagian depan

D. Tahap pengawasan

Pengguna anggaran dan tim pembangunan mahyani sehat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana, pengadaan barang dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh tim pembangunan mahyani sehat.

2.3. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah menganalisis penurunan angka kemiskinan melalui rehabilitasi sosial program rumah layak huni sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskritif analisis. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana peran program pembangunan rumah layak huni sehat di Kabupaten Gorontalo Utara dalam membantu menurunkan angka kemiskinan khususnya di Kecamatan Monano

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian untuk penyusunan skripsi ini adalah Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Dikarenakan Kecamatan Monano sangat luas, maka penulis hanya mengambil penelitian di tiga desa, yakni Desa Monano, Desa Monas dan Desa Sogu untuk mempermudah penelitian. Selain itu, ketiga desa tersebut merupakan desa terdekat dari pusat pemerintahan kecamatan sehingga data dan informasi yang penulis peroleh akan menjadi akurat.

3.4. Informan

Dalam penelitian yang telah dilakukan, mengingat pemerintah merupakan penyelenggara dan berhubungan langsung dengan program pembangunan rumah layak huni sehat ini penulis memilih seluruh informan dari pihak pemerintah kecamatan dan pemerintah desa agar informasi dan data yang diperoleh menjadi akurat.

Pihak pemerintah kecamatan Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapak Ratno Entengo, SE dan Ibu Lindrawati R. Aju, SH yang ditunjuk langsung oleh Bapak Supriadi Ibrahim selaku Camat Monano untuk menjadi narasumber bagi penulis dalam memperoleh informasi seputar program pembangunan rumah layak huni sehat di wilayah Kecamatan Monano. Sedangkan pihak pemerintah desa yang menjadi narasumber bagi penulis merupakan kasie ekonomi dan pembangunan dari masing-masing desa.

3.5. Sumber Data

A. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018:225)

B. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018:225)

3.6. Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi atau Pengamatan

Metode observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara melihat langsung di lapangan dan kemudian menarik kesimpulan.

B. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber

C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, di peroleh data yang di anggap kredibel. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phi chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:249) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah bagan teks yang bersifat naratif

c. *Conclusion Drawing/Verifikasi*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Monano merupakan salah satu Kecamatan di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang baru dimekarkan sebagai Daerah Otonom sendiri pada tanggal 29 Desember 2011 melalui Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 16 Tahun 2011 dimana amanat pemekaran Kecamatan Monano adalah percepatan pembangunan di berbagai sektor sehingga tercapainya visi dan misi kecamatan secara maksimal dan profesional dengan kondisi sebagai berikut :

A. Kondisi Geografis

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Anggrek
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumalata Timur

Kecamatan Monano memiliki luas wilayah $\pm 296,71$ Km² atau ± 29.671 Ha dengan luas Permukiman 1446,25 Ha, serta Luas Perkebunan 1352,66 Ha.

Kecamatan Monano secara administratif meliputi 10 (sepuluh) desa dengan pusat pemerintahan Kecamatan Monano terletak di Desa Mokonowu.

B. Kondisi Demografis

Adapun kondisi demografis dari Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara adalah :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

No	Desa	Jenis Kelamin		Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dunu	151	127	119
2	Tolitehuyu	172	174	99
3	Sogu	402	341	118
4	Monas	487	473	103
5	Monano	629	651	97
6	Zuriati	275	268	103
7	Mokonowu	320	323	99
8	Tudi	322	343	94
9	Pilohulata	504	264	191
10	Garapia	297	265	112
JUMLAH		3.559	3.229	110

Sumber: Kasie. Pemerintahan Tahun 2018

Jumlah kepala keluarga di wilayah Kecamatan Monano sampai akhir bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Kepala Keluarga

No	Desa	Jumlah KK
1	Dunu	71
2	Tolitehuyu	96
3	Sogu	200
4	Monas	960
5	Monano	373
6	Zuriati	158
7	Mokonowu	182
8	Tudi	187
9	Pilohulata	149
10	Garapia	157
JUMLAH		2.533

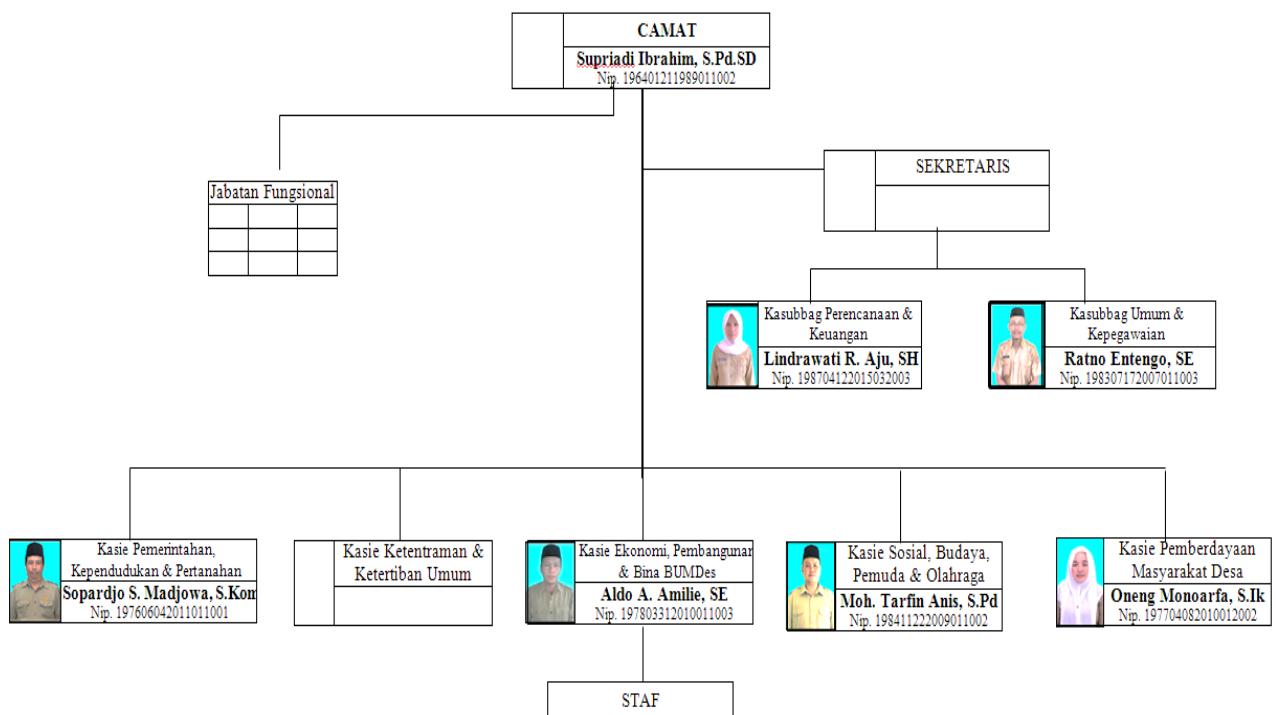
Sumber: Kasie. Pemerintahan Tahun 2018

Desa Monas merupakan salah satu desa di Kecamatan Monano yang memiliki jumlah KK tertinggi dibanding dengan desa lainnya, disusul oleh Desa Monano yang kemudian disusul oleh Desa Sogu. Ketiga desa ini merupakan desa yang saling berdekatan satu sama lain dan merupakan desa terpadat di Kecamatan Monano. Salah satu kegiatan ekonomi di Kecamatan Monano juga terletak di Desa Monano yakni pasar tradisional.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018 merupakan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Visi dan Misi dari langkah-langkah Strategi Kecamatan Monano tahun 2013-2018 yang mengacu pada Peraturan Bupati Gorontalo Utara, dan disamping itu merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran, sebagaimana amanat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara



4.3. Penyajian Dan Analisis Data Hasil Penelitian

Program Pembangunan Rumah Layak Huni (mahyani) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat yang telah berlangsung sejak tahun 2015. Namun pada tahun 2018 bantuan program rumah layak huni berubah menjadi rumah sehat yang disertai dengan jamban (wc) untuk mencegah masyarakat melakukan buang air besar sembarangan (BABS).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (mahyani) sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara serta untuk mengetahui dampak pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (mahyani) sehat terhadap penurunan kemiskinan di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara. Namun mengingat luas wilayah kecamatan ini $\pm 296,71 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 10 desa, maka peneliti hanya mengambil sampel penelitian pada tiga desa yaitu :

1. Desa Monano
2. Desa Monas
3. Desa Sogu

Ketiga desa tersebut penulis jadikan sampel penelitian disebabkan karena letak yang saling berdekatan serta merupakan tiga desa dengan jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Monano yang berarti bahwa

kemungkinan keluarga miskin penerima bantuan rumah layak huni sehat juga tinggi.

Berikut adalah data penerima program bantuan rumah layak huni sehat di tiga desa :

Tabel 4.3 Data Penerima Mahyani Tahun 2015-2019

No	Nama Penerima	Tahun Menerima Bantuan	Alokasi Dana
1	Hendrik Pusung	2015	Rp 26.000.000,-
2	Azis Mahmud	2015	Rp 26.000.000,-
3	Ali Y Saha	2015	Rp 26.000.000,-
4	Erik G Jama	2015	Rp 26.000.000,-
5	Samin Salehe	2015	Rp 26.000.000,-
6	Raman Datau	2016	Rp 26.000.000,-
7	Susu Suna	2016	Rp 26.000.000,-
8	Risno Mohi	2016	Rp 26.000.000,-
9	Hasdi Manto	2016	Rp 26.000.000,-
10	Husain Dambu	2016	Rp 26.000.000,-
11	Hamrain Saha	2016	Rp 26.000.000,-
12	Abd. Rahman Puji	2016	Rp 26.000.000,-
13	Ratna Karim	2017	Rp 26.000.000,-
14	Abd. Azis Otoluwa	2017	Rp 26.000.000,-
15	Ridwan Sali	2017	Rp 26.000.000,-
16	Saiful Huntu	2017	Rp 26.000.000,-
17	Abdul Gias Patila	2017	Rp 26.000.000,-
18	Lisbet Olii	2017	Rp 26.000.000,-
19	Salma Daud	2017	Rp 26.000.000,-
20	Sangga Suna	2018	Rp 26.000.000,-
21	Herlina Abas	2018	Rp 26.000.000,-
22	Dewi Otoluwa	2018	Rp 26.000.000,-
23	Salim Alhasni	2018	Rp 26.000.000,-
24	Kisman Mahmud	2018	Rp 26.000.000,-
25	Uyun Abdullah	2018	Rp 26.000.000,-
26	Yanto Maunte	2018	Rp 30.000.000,-
27	Mustapa Puji	2018	Rp 30.000.000,-
28	Ridwan Palilati	2018	Rp 30.000.000,-
29	Lilis Otoluwa	2019	Rp 30.000.000,-

30	Anita Karim	2019	Rp 30.000.000,-
31	Rulli Dunggio	2019	Rp 30.000.000,-
32	Hasan Aduka	2019	Rp 30.000.000,-
33	Usman K. Jama	2019	Rp 30.000.000,-
34	Roflan Pulumoduyo	2019	Rp 33.000.000,-
35	Apik S. Diko	2019	Rp 33.000.000,-
36	Iwan Nuntu	2019	Rp 33.000.000,-
37	Saripa Pinangi	2019	Rp 37.000.000,-
38	Nurdin Koha	2019	Rp 37.000.000,-
39	Yudin Harun	2019	Rp 37.000.000,-
40	Idrus Kasim	2019	Rp 37.000.000,-

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dana yang dianggarkan dalam program pembangunan rumah layak huni pada tahun 2015 – 2018 hanya berkisar Rp 26.000.000 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai Rp 30.000.000–Rp 37.000.000. Kenaikan anggaran ini disebabkan karena program rumah layak huni berubah menjadi rumah sehat.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2018:249) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah bagan teks yang bersifat naratif.

Dari uraian tersebut, hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (masyarakat) sehat di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan secara swakelola bahkan swadaya dalam artian anggaran mengalami peningkatan. Kecamatan Monano pada tahun 2019 lebih dari 30 (tiga puluh) juta rupiah yang sebelumnya hanya berkisar 26 (dua puluh enam) juta rupiah. Jadi pelaksanaannya melalui dana desa yang dianggarkan lebih dari 30 (tiga puluh) juta rupiah, untuk swadaya dari penerima. Swadaya dalam bentuk misal standar masyarakat tidak ada teras, penerima menambahkan bahan melalui swadaya untuk pembangunan teras atau ingin menambah ukuran penerima menambah bahan karena pemerintah tidak menganggarkan lebih dari 30 (tiga puluh) juta rupiah.
2. Dampak pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (masyarakat) sehat terhadap penurunan kemiskinan di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara belum terlalu signifikan untuk penurunan kemiskinan. Karena masyarakat bukan berupa modal atau kegiatan ekonomi
3. Keadaan penerima yang sebelumnya hidup dalam keadaan kumuh menjadi lebih sehat karena masyarakat diikuti dengan pembangunan jamban (WC)

4. Faktor penghambat dalam program pembangunan mahyani adalah pada saat verifikasi data terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi seperti lahan kepemilikan, akan tetapi sebagian besar tidak memiliki lahan

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (masyarakat sehat) di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara sudah berjalan dengan baik. Kehidupan masyarakat di Kecamatan Monano Gorontalo Utara telah mengalami kenaikan kualitas hidup menjadi lebih layak. Namun untuk dampak pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (masyarakat sehat) terhadap penurunan kemiskinan di Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara belum terlalu signifikan karena program bantuan rumah layak huni bukan merupakan bantuan modal. Program bantuan rumah layak huni merupakan program peningkatan kesejahteraan sosial.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat segera mengurus surat kepemilikan tanah sehingga pelaksanaan program pembangunan rumah layak huni (masyarakat sehat) lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Suryabrata, Sumadi. 2015. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Riduwan. 2015. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke-28 Bandung: Penerbit Alfabeta
- Rustanto, Bambang. 2015. *Menangani Kemiskinan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Cetakan Keenam. Bandung: PT. Refika Aditama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) Sehat Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) Di Kabupaten Gorontalo Utara
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan
- Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II. 2011

- Khusnul Khotimah, (2019). Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- BPS Kabupaten Gorontalo Utara, (2018). Kecamatan Monano Dalam Angka. CV. Grafika Karya
- Profil Kecamatan Monano
- www.bps.go.id (diakses pada 28 Januari 2020)
- gorontalo.bps.go.id (diakses pada 28 Januari 2020)

LAMPIRAN



Gambar 1. Proses pengambilan informasi pada Kantor Camat Monano



Gambar 2. Proses pengambilan data dan informasi pada Kantor Desa Monano



Gambar 3. Proses pengambilan data dan informasi pada Kantor Desa Monas



Gambar 4. Proses pengambilan data dan informasi pada Kantor Desa Sogu



Gambar 5. Pembangunan Rumah Sehat Salah Satu Warga Desa Sogu dengan Anggaran Rp 37.000.000,-



STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MONANO KABUPATEN GORONTALO UTARA

